

Total 22 Desa Hilang

Dari Halaman 1

Ia mengatakan, jumlah tertinggi dari keseluruhan kantor desa terdampak itu terletak di Aceh hingga 1.455, lalu Sumut 93, dan Sumbar 32 unit.
"Artinya, desanya enggak jalan pemerintahannya," ucapnya.

Tito memastikan pemerintah takkan tinggal diam dalam menanganai bencana ini. Ia menyampaikan sejak telah menerjunkan sembilan tim dalam membantu warga terdampak mengurus dokumen kependudukan mereka yang hilang.
"Mulai dari Kartu Keluarga, KTP elektronik, ada juga akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain yang diperlukan di dalam data itu,"

Ancam Kerahkan Massa Demo Lebih Banyak

Dari Halaman 1

Iqbal menegaskan, aksi demonstrasi hari ini merupakan aksi awal atau peringatan. Ia memastikan buruh akan kembali turun ke jalan pada awal Januari 2026 jika tuntutan mereka tidak direpons.
"Ini aksinya hanya aksi awalan. Nanti kita akan aksi lagi di awal-awal Januari," ujarnya.
Iqbal menjelaskan, terdapat dua tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi tersebut. Pertama, buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026. Kedua, mendesak Gubernur DKI Jakarta segera mengesahkan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2026.
Menurutnya, alasan utama penolakan buruh adalah penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,73 juta. Ia menilai angka terse-

but berada di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Pemerintah DKI Jakarta menurunkan daya beli rakyat Jakarta, karena upah minimum yang ditetapkan lebih rendah dari KHL yang justru diumumkan sendiri oleh BPS," ujarnya.
Iqbal menegaskan, pihaknya meminta Gubernur DKI Jakarta menetapkan upah minimum sebesar Rp5,89 juta, sesuai nilai KHL. Ia juga membandingkan dengan daerah penyangga Jakarta yang memiliki upah minimum lebih tinggi.
"Upah Minimum di Bekasi dan Karawang kira-kira Rp5,95 juta, jauh lebih tinggi dari UMP DKI Jakarta yang Rp5,73 juta. Apakah itu masuk akal?" ucapnya.
Terkait kebijakan insentif yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Iqbal menilai insentif tersebut tidak bisa dijadikan pengganti

Buruh Demo Tuntut Revisi UMP

Dari Halaman 1

butuhan Hidup Layak (KHL).
"Tuntutan aksi pada hari ini ada dua. Yang pertama, ubah atau revisi UMSP DKI Jakarta 2026 menjadi Rp5,89 juta, yaitu 100 persen KHL. Dan tetapkan UMSP, Upah Minimum Sektor Provinsi DKI Jakarta 2026, sekurang-kurangnya 5 persen di atas KHL yang 100 persen tadi," ujar Said Iqbal saat berorasi.
Tuntutan kedua, lanjut Iqbal, adalah meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengembalikan penetapan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 di 19 daerah yang sebelumnya dihapus. Ia menyebut kebijakan tersebut seharusnya mengikuti rekomendasi para bupati dan wali kota setempat.
1.392 Aparat Disiagakan Kawal Demo Buruh di Jakarta Pusat Hari Ini
Pramono Anung Respons Buruh Demo Besar Tolak UMP Jakarta 2026
"Yang kedua, meminta Gubernur Jawa Barat untuk mengembalikan 19 kabupaten/

kota UMSK-nya, sesuai rekomendasi bupati dan wali kota. Termasuk juga di Jawa Timur dan DKI Jakarta. Ada juga Sumatera Utara," katanya.
Iqbal menegaskan, aksi demonstrasi hari ini merupakan aksi awal atau peringatan. KSPI dan Partai Buruh berencana kembali menggelar aksi lanjutan pada awal Januari 2026.
"Ini aksinya hanya aksi awalan, aksi peringatan. Nanti kita akan aksi lagi di awal-awal Januari," ujarnya.
Selain itu, aksi buruh juga akan kembali digelar pada Selasa (30/12). Iqbal memperkirakan jumlah massa yang hadir bisa mencapai 20.000 orang.
"Rencana kami besok aksi lagi, sekitar 10.000 motor, bisa juga berjumlah 20.000 orang akan hadir," tuturnya.
Iqbal menyebut penolakan terhadap penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,73 juta menjadi alasan utama aksi tersebut. Menurutnya, angka itu lebih rendah dari nilai KHL yang telah ditetapkan Badan Pusat Statistik

Prabowo Kirim Helikopter Pribadi

Dari Halaman 1

digunakan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dalam penanganan bencana.
"Sejak minggu pertama bencana bapak presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau ke Aceh untuk digunakan oleh gubernur Aceh, beserta timnya, beserta keluarganya silahkan digunakan kemanapun berkeliling Aceh itu sejak minggu pertama," kata Teddy di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin (29/12).
Teddy menyampaikan sejak hari pertama bencana, pemerintah telah memberikan upaya terbaiknya dalam penanganan di lokasi.

Ia memastikan pemerintah tak tinggal diam dan terus bergerak dalam menanganai bencana. Pada saat yang sama, Teddy juga merespons sejumlah pihak yang membanding-bandingkan penanganan bencana hari ini dengan bencana-bencana sebelumnya.
Ia menyebut setiap bencana memiliki tantangannya sendiri, sehingga penanganannya pun bisa saja berbeda satu sama lain.
"Dan sekarang ini kita sudah masuk dalam satu bulan pasca bencana, satu bulan pertama dan alhamdulillah pemerintah kita semua disini, termasuk rekan-rekan pers dan semua yang ada di sana, dalam satu bulan ini kita ada hasil

15 Ribu Ton Beras Sudah Dikirim ke Korban

Dari Halaman 1

ah (CBP) serta cadangan minyak goreng yang disalurkan melalui Perum Bulog.
"Untuk Aceh, bantuan hampir 15 ribu ton sudah dikirim, tepatnya 14.898 ton beras. Selain itu juga disalurkan 1,5 juta liter minyak goreng," kata Zulhas ditemui di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (29/12).
Selain Aceh, pemerintah juga menyalurkan bantuan ke Sumatra Utara. Zulhas menyebut jumlah beras yang dikirim ke provinsi tersebut mencapai hampir 20 ribu ton.

"Sumatra Utara sebanyak 19.776 ton beras, hampir 20 ribu ton, dan minyak goreng sekitar 3 juta liter," ujarnya.
Sementara itu, bantuan untuk Sumatra Barat juga telah disalurkan dengan total hampir 8 ribu ton beras. Selain beras, pemerintah mengirimkan lebih dari satu juta liter minyak goreng ke daerah tersebut.
"Sumatra Barat 7.900 ton beras, hampir 8 ribu ton, dengan minyak goreng 1,33 juta liter," imbuh Zulhas.
Ia menegaskan seluruh penyaluran bantuan pangan tersebut dilaksanakan oleh Perum Bulog.

Kepemimpinan Tanpa Ilmu, Peradaban Tanpa Arah

Dari Halaman 1

etahuan sering ditempatkan sebagai pelengkap. Ilmu hadir setelah keputusan diambil, bukan sebagai penuntun sebelum langkah ditetapkan. Padahal, tanpa pengetahuan yang jernih, kekuasaan mudah berubah menjadi kehendak sepihak, dan kepemimpinan kehilangan orientasi moral serta tanggung jawab jangka panjang.
Al-Qur'an sejak awal meletakkan fondasi kepemimpinan manusia secara berbeda. Kisah penciptaan manusia tidak dimulai dengan penegasan otoritas atau kekuatan, melainkan dengan pengetahuan. Ketika Nabi Adam diamanahi peran sebagai khalifah di muka bumi, yang disebut pertama bukanlah kuasanya, tetapi kemampuannya memahami realitas. Adam diajarkan nama-nama, yakni pengetahuan tentang makna dan fungsi kehidupan yang akan ia kelola. Ilmu itulah yang mengangkat martabatnya dan menjadikannya layak memikul amanah besar.
Pesan ini tegas: kepemimpinan sejak awal bukanlah soal menguasai, tetapi soal memahami. Ilmu bukan hadiah tambahan, melainkan syarat utama. Amanah diberikan bersamaan dengan pengetahuan agar manusia tidak berjalan dalam gelap. Ketika kepemimpinan terlepas dari ilmu, sesungguhnya yang terjadi adalah pengingkaran terhadap fondasi awal penciptaan manusia itu sendiri.
Ironisnya, semakin maju peradaban, semakin sering ilmu dipisahkan dari kekuasaan. Pengetahuan berkembang pesat di ruang akademik dan

riset, tetapi kebijakan publik kerap ditentukan oleh kepentingan jangka pendek. Ilmu berbicara melalui data, kehati-hatian, dan proyeksi dampak, sementara kekuasaan sering melangkah dengan tergesa-gesa. Di sinilah letak kegelisahan manusia modern: bukan karena kekurangan pengetahuan, melainkan karena pengetahuan tidak lagi dijadikan penuntun utama.
Amanah sebagai khalifah sejatinya bukan mandat untuk menaklukkan, melainkan tanggung jawab untuk merawat. Merawat kehidupan, menjaga keseimbangan, dan membaca batas. Dalam konteks ini, ilmu berfungsi sebagai cahaya pembatas keserakahan. Tanpa pengetahuan, manusia mudah berperilaku alam dan sesamanya sebagai objek. Dengan ilmu, manusia diingatkan bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi yang melampaui generasinya sendiri.
Al-Qur'an berulang kali mengingatkan bahwa keruntuhan peradaban tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia retak perlahan ketika pengetahuan diabaikan dan peringatan tidak lagi dipedulikan. Kisah Nabi Yusuf, misalnya, menunjukkan bagaimana sebuah peradaban diselamatkan bukan oleh kekuatan militer, tetapi oleh kemampuan membaca tanda-tanda zaman. Pengetahuan tentang mimpi diterjemahkan menjadi perencanaan. Masa subur dikelola, masa sulit dipersiapkan. Ilmu diubah menjadi kebijakan, dan kebijakan menyelamatkan banyak kehidupan.
Sebaliknya, kaum 'Ad dan Tsamud memiliki kekuatan fisik dan teknologi luar biasa pada masanya. Mereka mampu membangun dan me-

ujarnya.
Selain itu, Tito menyebut Kemendagri juga berencana mengirimkan sekitar 1.054 Praja IPDN untuk membantu warga terdampak di lokasi bencana mulai 3 Januari 2026 pekan depan.
"Selama sebulan mereka akan bekerja di daerah yang paling berat terdampak, yaitu Aceh Tamiang dan Aceh Utara," ucap dia.(cnni/js)

kenaikan upah minimum karena bersifat terbatas dan bergantung pada anggaran APBD. Ia mencontohkan laporan dari sejumlah pabrik di kawasan industri Cilincing dan Pulogadung. Dari total 300 karyawan di satu pabrik, hanya sekitar 15 orang atau 5 persen yang menerima insentif.
"Jadi insentif itu bukan bagian dari upah minimum, melainkan bantuan sosial," katanya.
Selain itu, KSPI juga menuntut Gubernur Jawa Barat untuk mengembalikan penetapan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 di 19 daerah yang dinilai telah dihilangkan, dikurangi, atau dihapus melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur.
"Kami minta itu dicabut dan direvisi menjadi SK Gubernur yang baru, sehingga UMSK di 19 kabupaten/kota dihidupkan kembali sesuai rekomendasi bupati dan wali kota," kata Iqbal.(cnni/js)

(BPS).
"Pemerintah DKI Jakarta menurunkan daya beli rakyat Jakarta, karena Upah Minimum yang ditetapkan lebih rendah dari KHL yang diumumkan sendiri oleh BPS," katanya.
Ia menambahkan, upah minimum di wilayah penyangga seperti Bekasi dan Karawang justru lebih tinggi dibanding Jakarta.
"Upah Minimum di Bekasi dan Karawang sekitar Rp5,95 juta, jauh lebih tinggi dari UMP DKI Jakarta Rp5,73 juta. Apakah masuk akal?" ujarnya.
Terkait insentif yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Iqbal menilai kebijakan tersebut tidak dapat menggantikan kenaikan upah minimum karena bersifat terbatas dan bergantung pada anggaran daerah.
"Saya ambil contoh pabrik di Cilincing dan Pulogadung. Dari 300 karyawan, yang menerima insentif hanya 15 orang atau sekitar 5 persen. Jadi insentif bukan bagian dari upah minimum, melainkan bantuan sosial," jelasnya.(cnni/js)

konkret," ucap dia.
Ia mengatakan bencana banjir bandang dan longsor ini terdampak di tiga provinsi di Sumatra, berdampak ke sekitar 52 kabupaten di sana.
"78 jalan nasional putus. per satu bulan dari 78, tinggal 6 yang masih proses penyambungan, 4 titik di Aceh dan di Sumbar dan Sumut," ucapnya.
Lalu, bencana itu juga berdampak pada rusaknya fasilitas jembatan lintas kabupaten.
"Sekarang per satu bulan, 12 jembatan yang sungainya lebar-lebar 50 meter ke atas, bahkan di Biereun itu sampai 180 meeter itu tersambung," ucap dia.(cnni/js)

Ia mengaku telah menerima laporan langsung dari Direktur Utama Bulog terkait realisasi distribusi bantuan ke Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
"Itu pelaksanaannya dilakukan Bulog dan saya sudah mendapatkan laporan dari Dirut Bulog soal penanganan Aceh, Sumut dan Sumbar," tegasnya.
Pemerintah, lanjut Zulhas, memastikan distribusi bantuan pangan bagi korban bencana di Sumatra akan terus dipantau agar tepat sasaran dan membantu meringankan beban masyarakat terdampak.(cnni/js)

naklukkan alam, tetapi kehilangan kebijaksanaan. Pengetahuan digunakan untuk menegaskan kesombongan, bukan menjaga keseimbangan. Peringatan dianggap gangguan, batas dipandang sebagai kelemahan. Ketika ilmu tidak disertai kesadaran moral, kekuatan justru mempercepat kejatuhan.
Kisah-kisah itu bukan sekadar cerita masa lalu. Ia terus berulang dengan wajah yang berbeda. Manusia modern memiliki teknologi canggih, data melimpah, dan akses pengetahuan yang luas. Namun pertanyaannya tetap sama: apakah semua itu digunakan untuk membaca masa depan, atau sekadar mempercepat kepentingan hari ini? Ketika pengetahuan disisihkan dari pengambilan keputusan, peradaban runtuh bukan karena kurang kemampuan, melainkan karena kehilangan arah.
Pada akhirnya, semua kembali pada amanah manusia sebagai khalifah. Sejak Adam, manusia tidak dibiarkan tanpa petunjuk. Ilmu diberikan agar kekuasaan tidak menjadi sewenang-wenang, agar pembangunan tidak mengorbankan masa depan, dan agar kepemimpinan tetap berada dalam batas tanggung jawab. Sejarah menunjukkan, yang hilang dari peradaban runtuh bukanlah kecerdasan, melainkan kesediaan untuk belajar dan mendengar peringatan.
Di tengah dunia yang bisung oleh kepentingan dan percepatan, pertanyaan terpenting hari ini bukanlah seberapa besar kekuasaan yang kita miliki, melainkan seberapa jujur kita mau belajar. Sebab sejak awal penciptaan, kepemimpinan sejati selalu dimulai dari kerendahan hati untuk memahami.(*)

Hukuman Pidana

Dari Halaman 1

Ia menjelaskan nantinya lokasi dan kerja sosial yang akan diberikan ditentukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah terkait.
"Hasil koordinasi para Kalapas, Karutan dengan pemerintah daerah ini sudah membuat beberapa alternatif tempat dan jenis pekerjaan yang dikerjakan," tuturnya.
Hukuman pidana kerja sosial ini tertuang dalam Pasal 65 huruf e KUHP yang disahkan pada 2 Januari 2023 dan akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) juga sudah bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) untuk menyiapkan penerapan hukuman pidana kerja sosial untuk ancaman pidana yang kurang dari lima tahun penjara.(cnni/js)

Banjir Landa

Dari Halaman 1

gan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang, Ajat Sudrajat menyebutkan bahwa luapan sungai mulai masuk ke rumah warga sekitar pukul 20.00 WIB.
Banjir kali ini merendam sedikitnya 308 rumah yang tersebar di Desa Citasuk dan Desa Kalumpung.
"Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan aliran Kali Cikalumpang kembali meluap dan masuk ke permukiman," katanya mengutip Antara, Senin (29/12).
Data BPBD menunjukkan dampak terparah berada di Desa Citasuk, mencakup Kampung Sukamaju dan Kampung Begog, serta Desa Kalumpung di Kampung Bayur dan Rancasumur. Tercatat sebanyak 350 kepala keluarga atau sekitar 1.200 jiwa terdampak oleh musibah rutin tahunan ini.
Satu Lansia Yewas
Ia menuturkan bahwa musibah banjir kali ini memakan satu korban jiwa, yakni seorang warga bernama Marto (60) asal Kampung Begog, Desa Citasuk.
Selain itu, sebanyak enam orang warga terpaksa mengungsi ke gedung SD Sukamaju karena kediaman mereka belum bisa ditempati.
Selain rumah tinggal, banjir juga merendam fasilitas umum, salah satunya Madrasah Diniyah Mathla'ul Anwar.
"Petugas kami telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi warga dan terus memantau pergerakan debit air sungai," tambah Ajat.
Hingga Senin pagi, tinggi muka air (TMA) di lokasi terdampak dilaporkan mulai menunjukkan tren menurun dan berada di kisaran 20 hingga 60 sentimeter. Meski air berangsur surut, sebagian besar warga masih memilih bertahan di rumah masing-masing untuk menjaga barang berharga.
Pihak BPBD bersama Polsek, Koramil, dan PMI Kabupaten Serang tetap bersiaga di lokasi guna mengantisipasi adanya kiriman air susulan, mengingat kondisi cuaca di wilayah Padarincang saat ini masih terpantau berawan. Sebelumnya banjir juga telah melanda Kecamatan Padarincang pada 17 Desember 2025.(cnni/js)



Hidayah

Hindari Kembang Api

Dari Halaman 1

(saling menolong) dan ukhuwah insaniyah menuntut kepekaan kolektif, terlebih ketika musibah merampas ruang hidup sebuah komunitas. Hilangnya desa bukan sekadar kerusakan fisik, melainkan hilangnya memori, identitas, dan martabat sosial.
Di sinilah pembatalan kembang api menemukan maknanya. Ia menjadi bahasa empati negara. Dalam teori komunikasi simbolik, tindakan lebih kuat daripada kata-kata. Ketika negara menahan pesta cahaya, ia sedang mengirim pesan: ada luka yang harus dihormati. Namun, pesan simbolik hanya bermakna jika dipahami dan dikomunikasikan dengan jujur kepada publik.
Masalahnya, empati sering kali berhenti pada simbol. Puluhan desa yang hilang menyingkap persoalan struktural yang selama ini diabaikan: tata kelola lingkungan yang abai, pembiaran alih fungsi lahan, serta mitigasi bencana yang lemah. Dalam kacamata agama, bencana tidak boleh semata dibaca sebagai takdir, tetapi juga sebagai akibat dari kelalaian manusia. Al-Qur'an mengingatkan bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi karena ulah manusia sendiri.
Dari sudut pandang komunikasi publik, negara belum sepenuhnya berhasil menjelaskan tragedi ini secara utuh. Publik lebih banyak mendengar soal pembatalan perayaan, tetapi minim penjelasan tentang bagaimana desa-desa itu bisa lenyap, apa rencana pemulihannya, dan ke mana arah relokasi warganya. Komunikasi yang timpang seperti ini berisiko melahirkan empati semu: publik diminta berduka, tetapi tidak diajak memahami akar masalah.
Agama mengajarkan pentingnya qaulan baligha perkataan yang sampai ke hati dan akal.
Negara seharusnya tidak hanya mengumumkan larangan, tetapi juga membangun narasi keadilan ekologis dan kemanusiaan. Desa-desa yang hilang harus dihadirkan dalam wacana publik, bukan disenyapkan oleh hiruk-pikuk pergantian tahun. Tanpa narasi itu, korban akan kembali terpinggirkan, kali ini oleh lupa kolektif.
Lebih jauh, hilangnya desa adalah peringatan keras tentang arah pembangunan. Ketika tanah, hutan, dan sungai diperlakukan semata sebagai komoditas, maka desa-desa di kawasan rentan menjadi korban pertama. Dalam perspektif agama, ini adalah krisis amanah. Alam bukan warisan yang boleh dihabiskan, melainkan titipan yang harus dijaga.
Pembatalan kembang api akan terasa hampa jika tidak disertai keberanian negara menata ulang relasi pembangunan dan lingkungan.
Dari sisi komunikasi, empati sejati menuntut konsistensi pesan dan tindakan. Jika negara mengajak publik menahan euforia, maka negara juga harus menunjukkan keberpihakan nyata kepada warga desa yang kehilangan segalanya. Transparansi data, kejelasan relokasi, dan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan adalah bagian dari komunikasi etis.
Pada akhirnya, langit tanpa kembang api seharusnya menjadi ruang perenungan nasional. Bukan hanya tentang duka sesaat, tetapi tentang desa-desa yang benar-benar hilang dari peta dan ingatan. Agama memberi kita kompas moral, komunikasi menentukan arah kesadaran publik. Jika keduanya berjalan seiring, maka di balik gelapnya langit Tahun Baru, bangsa ini bisa menyalakan kembali cahaya keadilan dan kemanusiaan terutama bagi mereka yang kehilangan tanah tempat berpijak.